

PERANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN MINAHASA UTARA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA (Suatu Studi di Desa Nain, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara)

Ardhiansya Daud¹
Agustinus Pati²
Sofia Pangemanan³

Abstrak

Kemajuan pariwisata serta peranan pemerintah daerah dan peningkatan jumlah wisatawan di daerah kabupaten Minahasa Utara terus mendorong meningkatnya kebutuhan wisatawan akan fasilitas yang menunjang, serta sarana dan prasarana. Pariwisata juga dapat meningkatkan pola pikir yang mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana peranan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan potensi objek wisata pantai Bungin Nain dan pulau Nain. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan teknik prosedur pengumpulan (Observasi Lapangan), Instrument wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, tersruktur dengan pedoman dan Studi dokumentasi, terutama mengenai akurasi sumber dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif dengan menjelaskan atau menggambarkan data yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah (dinas pariwisata dan kebudayaan) dalam mengelola sektor pariwisata adalah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Minahasa Utara lebih khusus pulau Nain Kecamatan Wori, melengkapi sarana serta prasana penunjang pariwisata. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan potensi pariwisata adalah faktor pendukung yaitu objek wisata-wisata yang sudah terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas, partisipasi masyarakat dan koordinasi pemerintah dengan pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan dan, lokasi geografis objek wisata, serta minim dan tidak terpusatnya informasi. Selain itu, dari hasil penelitian berikutnya terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara seperti kurangnya dana, kontroversi kepemilikan lahan kawasan wisata, belum adanya investor, kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah serta minimnya sumber daya manusia.

Kata Kunci : Pengembangan, Potensi Wisata.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian dan sebagai penghasil devisa negara kedua setelah minyak bumi dan gas alam. Sejak tahun 1978 pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam meningkatkan jumlah devisa bagi negaranya. Tidak hanya itu, pariwisata juga merupakan sektor yang multisektoral. Karena dalam sistem yang besar, pengembangan sektor pariwisata dapat berdampak pada sektor lainnya seperti budaya, lingkungan, sosial, politik serta sektor ekonomi. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, dan kelancaran pelayanan. Dalam beberapa tahun ini, pengelolaan di Kabupaten Minahasa Utara mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Ini bisa dilihat dari pertumbuhan pembangunan serta pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, baik fisik maupun non fisik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya maupun perkembangan jumlah penduduk. Memungkinkan pembangunan pertumbuhan pelayanan jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan maupun kegiatan lainnya di

seluruh wilayah yang diimbangi dengan penataan ruang wilayah kabupaten. Khusus pengembangan pelayanan jasa sektor pariwisata menjadi salah satunya yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam meningkatkan jumlah devisa bagi negaranya. Tidak hanya itu, pariwisata juga merupakan sektor yang multisektoral. Karena dalam sistem yang besar, pengembangan sektor pariwisata dapat berdampak pada sektor lainnya seperti budaya, lingkungan, sosial, politik serta sektor ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dengan baik dan maksimal akan mampu menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk datang dan membelanjakan uangnya dalam kegiatan berwisatanya. Dari transaksi itulah masyarakat daerah wisata akan terangkat taraf hidupnya serta negara akan mendapat devisa dari wisatawan asing yang menukar mata uang negaranya dengan rupiah.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dapat diketahui bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa.

Ada beberapa tempat wisata di Kabupaten Minahasa Utara khususnya

di Desa Nain yang memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan pulau-pulau disekitarnya (Mantehage, Bunaken dan Siladen).Pesisirnya dikelilingi oleh deretan rumah kayu dibangun di atas tiang – tiang kayu yang menancap ke dasar air. Antara rumah satu dengan lainnya dihubungkan oleh jejeran papan sebagai jalan penghubung di atas tiang – tiang yang juga berfungsi sebagai tempat mengikat perahu nelayan yang sungguh mempesona. Daratannya dikelilingi rumah-rumah yang mengapung. Jarak dari pinggir pantai hingga pinggir karang bervariasi antara 250m hingga 300m, Masyarakat Nain juga mempunyai kegiatan seperti usaha kerajinan ukiran, adanya tempat keramat, kegiatan tradisional masyarakat, trumbu karang yang bagus untuk penyelaman, budidaya rumput laut, gua bawah laut. Dan selain itu terdapat juga beberapa objek wisata yang dapat menjadi daya tarik tersendiri yaitu salah satunya kawasan wisata pantai pasir (bungin) dan pulau Nain kecil yang terletak tidak jauh dari Pulau Nain, Kecamatan Wori. Wisata pantai Nain Bungin merupakan kawasan pantai yang luasnya ±32.5Ha.yang terletak di pesisir pantai Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Wori, desa Nain. Kawasan wisata pantai Nain memiliki pemandangan yang indah dan bisa dijadikan tempat untuk rekreasi dan berenang serta dibuat sarana dan prasarana untuk penunjang tempat wisata tersebut yang terkenal akan pasir timbul tersebut (bungin). Dan jika potensi ini dikembangkan dengan lebih baik, tentunya akan lebih menarik lagi.

Namun semua ini belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah setempat, hal ini dapat dilihat dari kurangnya infrastruktur serta fasilitas yang mendukung kawasan wisata Pulau Nain yang ada di Kabupaten Minahasa Utara khususnya

wisata pantai pulau Nain dan pulau Nain kecil.Padahal Kabupaten Minahasa Utara mempunyai pencapaian sasaran visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagai DTW atau Daerah Tujuan Wisata Tahun 2015. Selain kekayaan dan potensi alam yang dimiliki Minahasa Utara kaya akan Seni dan budaya serta peninggalan sejarah dan cagar budaya. yang seharusnya membangun dan mengembangkan objek wisata yang ada merupakan salah satu poin untuk mengenalkan daerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi pemerintah belum melihat dari segi hal itu.

Tinjauan Pustaka

Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdaya, dan pengatur masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukamto bahwa peranan adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hal-hal serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.Menurut Ralph Linton dalam Soekanto (2009:14) membedakan peranan dalam dua bagian yakni “peranan yang melekat pada diri seseorang dan peranan yang melekat pada posisi tepatnya dalam pergaulan masyarakat”. Menurut Soekanto (2010:268) mendefinisikan peranan: “Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (statis) la seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan”

Menyimak pendapat tersebut dapat ditarik beberapa pokok pikiran mengenai peranan yaitu adanya kedudukan yang bersifat statis, adanya hak dan kewajiban serta adanya hubungan timbal-balik antara peranan dan kedudukan. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa istilah peranan mengandung beberapapengertian, antara lain :

- a. Peranan adalah suatu konsep perilaku,
- b. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/kedudukan seseorang dalam masyarakat, dan
- c. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) adalah perangkat Pemerintah daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah daerah terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk kabupaten disebut wakil bupati. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD Provinsi. Sekretaris DPRD Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD Kabupaten. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana di maksud dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.

Menurut Rostow dalam buku perencanaan dan pengembangan wilayah (Ernan, Sunsun dan Dyah 2009:121) proses pertumbuhan dapat dibedakan ke dalam lima tahap dan setiap Negara atau wilayah dapat digolongkan ke dalam salah satu dari lima tahapan tersebut. Yaitu masyarakat

tradisional, prasyarat lepas landas, lepas landas, gerakan kearah kedewasaan serta masa konsumsi tinggi.

Kelima tahapan tersebut digolongkan atas dasar ciri-ciri perubahan keadaan ekonomi, politik, dan social yang berlaku. Menurut Rostow, pembangunan suatu bangsa atau pengembangan wilayah diawali oleh transformasi struktural masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang merupakan proses berdimensi banyak (multy dimentional). Pandangan lain diungkapkan oleh Hayami dan Ruttan yang dikutip dalam buku perencanaan dan pengembangan wilayah (Ernan, Sunsun dan Dyah 2009:125) yang dikenal dengan induced innovation model bahwa pengembangan mau tidak mau memang memanfaatkan sejumlah sumber daya alam. Sampai tahap perkembangan tertentu, bisa saja sumber daya alam yang ada dirasakan semakin langka.

Menurut Sumarmi (2012:15) dalam bukunya pengembangan wilayah berkelanjutan, pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan pendekatan geografi. Pendekatan geografi merupakan landasan terhadap pengembangan wilayah. Pendekatan geografi dalam pengembangan wilayah dilakukan dengan cara memperhatikan aspek-aspek geografi yang ada di wilayah tersebut. Pendekatan ini dilakukan melalui penetapan masalah, pengumpulan data dan analisis data mulai dari kegiatan penyaringan, pengelompokan, klasifikasi data, kegiatan pewilayahan, korelasi dan analogi. Oleh karena adanya keragaman berbagai masalah yang dihadapi masyarakat berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah dan skala waktu pelaksanaan, disusun skala prioritas pengembangan wilayah.

Menurut Yoeti dalam bukunya perencanaan dan pengembangan pariwisata (2008:49), batasan

perencanaan terdapat unsur suatu pandangan jauh ke depan, merumuskan secara konkret apa yang hendak dicapai dengan menggunakan alat-alat secara efektif dan ekonomis dan menggunakan koordinasi dalam pelaksanaannya. Sedangkan aspek-aspek yang perlu diketahui dalam perencanaan pariwisata adalah wisatawan, transportasi, atraksi/objek wisata, fasilitas pelayanan serta informasi dan promosi.

Menurut Inskeep (2006:38), Komponen-komponen wisata dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Atraksi dan kegiatan-kegiatan wisata: Kegiatan-kegiatan wisata yang dimaksud dapat berupa semua hal yang berhubungan dengan lingkungan alami, kebudayaan, keunikan suatu daerah dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan wisata yang menarik wisatawan untuk mengunjungi sebuah objek wisata.
2. Akomodasi: Akomodasi yang dimaksud adalah berbagai macam hotel dan berbagai jenis fasilitas lain yang berhubungan dengan pelayanan untuk para wisatawan yang berniat untuk bermalam selama perjalanan wisata yang mereka lakukan.
3. Fasilitas dan pelayanan wisata: Fasilitas dan pelayanan wisata yang dimaksud adalah semua fasilitas yang dibutuhkan dalam perencanaan kawasan wisata. Fasilitas tersebut termasuk tour and travel operations (disebut juga pelayanan penyambutan). Fasilitas tersebut misalnya : restoran berbagai jenis tempat makan lainnya, toko-toko untuk menjual hasil kerajinan tangan, cinderamata, toko-toko khusus, toko kelontong, bank, tempat penukaran uang dan fasilitas pelayanan keuangan lainnya, kantor informasi wisata, pelayanan pribadi (seperti

salon kecantikan), fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas keamanan umum (termasuk kantor polisi dan pemadam kebakaran), dan fasilitas perjalanan untuk masuk dan keluar (seperti kantor imigrasi dan bea cukai).

4. Fasilitas dan pelayanan transportasi: Meliputi transportasi akses dari dan menuju kawasan wisata, transportasi internal yang menghubungkan atraksi utama kawasan wisata dan kawasan pembangunan, termasuk semua jenis fasilitas dan pelayanan yang berhubungan dengan transportasi darat, air, dan udara.
5. Infrastruktur lain: Infrastruktur yang dimaksud adalah penyediaan air bersih, listrik, drainase, saluran airtor, telekomunikasi (seperti telepon, telegram, telex, faksimili, dan radio).

Elemen kelembagaan : Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan yang diperlukan untuk membangun mengelola kegiatan wisata, termasuk perencanaan tenaga kerja dan program pendidikan dan pelatihan; menyusun strategi marketing dan program promosi; menstrukturisasi organisasi wisata sektor umum dan swasta; peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan wisata; menentukan kebijakan penanaman modal bagi sektor publik dan swasta; mengendalikan program ekonomi, lingkungan, dan sosial kebudayaan.

Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan dilakukan dengan mengelola sumber daya pariwisata (Tourism Resources) yang tersebar diseluruh wilayah tanah air. Sebelum suatu rencana akan dilakukan, untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan mutlak kiranya terlebih dahulu dilakukan pendekatan pada pemuka adat setempat (A.Yoeti, 2008:253) dalam kasus ini adalah masyarakat setempat, perlu dilakukan

penjelasan dengan melakukan sosialisasi manfaat dan keuntungan proyek bagi penduduk setempat dan para stakeholder agar terwujudnya sebuah pengembangan kawasan pariwisata yang berkelanjutan dan pro community. Verseci dalam A.Yoeti (2008:253) perencanaan strategis pembangunan pariwisata berkelanjutan memberikan kerangka kerja sebagai berikut :

1. Future Generation, yaitu generasi yang akan datang yang perlu diperhatikan kecukupan sumber daya untuk memperoleh kehidupan yang berimbang
2. Tourism Resources, yaitu sumber daya pariwisata yang dikelola dengan memperhatikan keempat factor lainnya : future generation, equity, partnership, dan carrying capacity
3. Equity, yaitu sikap rencana dan pengelola yang dituntut selalu memperhatikan unsur keadilan untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan di waktu yang akan datang
4. Carrying Capacity, yaitu kemampuan suatu kawasan untuk menampung kunjungan wisatawan dan semua permasalahan yang terjadi sebagai akibat kunjungan wisatawan ini

Partnership, yaitu kemitraan yang perlu diciptakan antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang.

Menurut Drs. Oka A. Yoeti dalam buku pengantar ilmu pariwisata mendefinisikan objek wisata atau tourist attraction sebagai segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu tempat tertentu. Dalam dunia pariwisata segala sesuatu yang bernilai untuk dikunjungi atau untuk dilihat dapat disebut atraksi atau lazim disebut objek wisata (Ilmu pariwisata, Nyoman S. Pandit 1994). Dari beberapa definisi di atas maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa objek wisata merupakan segala yang mempunyaidaya tarik tertentu, baik dilihat segi keunikan dan nilai yang tinggi yang menjadi tujuan wisatawan untuk mengunjungi ke daerah tersebut.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat skematik, narasi, uraian data dari penjelasan informan baik lisan maupun berbentuk data dokumen yang tertulis, perilaku subjek yang diamati di lapangan juga menjadi data dalam mengumpulkan hasil penelitian ini. Unsur manusia sebagai instrument kunci yaitu peneliti yang terlibat langsung dalam observasi partisipasi, unsur informan terdiri atas kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Utara, Camat Kecamatan Wori, Kepala Desa desa Nain, pengurus kawasan wisata pantai Nain, Investor, wisatawan dan tokoh masyarakat serta lokasi penelitian sebagai data pendukung penelitian.

Hasil Penelitian

Dari hasil temuan, dalam pengembangan potensi objek wisata di Kabupaten Mianahasa Utara khususnya Obyek Wisata Pantai Bungin Nain dan pulau Nain terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Utara dalam proses pengembangan, kendala atau hambatan tersebut antara lain :

a. Keterbatasan sumber dana

Dimana penyediaan dana relatif rendah dibanding dengan program yang diusulkan. Padahal masih banyak potensi objek wisata yang bisa dikembangkan asalkan tersedianya dana APBD untuk membantu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Minahasa Utara guna pembiayaan yang antara lain sarana dan prasarana.

b. Kepemilikan Lahan

Ini merupakan masalah paling sensitive, karena pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Minahasa Utara sampai saat ini belum bisa mengatasinya mengingat masyarakat setempat masih mengklaim kepemilikan lahan yang ada di kawasan wisata pantai Bungin Nain dan Pulau Nain.

c. Belum Ada Investor

Investor merupakan komponen penting dalam mengembangkan pariwisata serta merupakan pihak yang sampai saat ini masih dicari oleh pemerintah Desa guna mengembangkan kawasan wisata pantai Bungin Nain dan Pulau Nain.

d. Kurangnya Komunikasi Antara Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kab.Minahasa Utara kurang berhubungan langsung dengan masyarakat setempat khususnya para pemilik lahan yang ada di kawasan wisata pantai Bungin Nain dan pulauNain.

e. Terbatasnya SDM Dalam Bidang Pariwisata

Masyarakat di sekitar pantai Bungin Nain yang memang masih terbatas di bidang kepariwisataan serta kurangnya SDM di bidang Kepariwisataan dalam struktural dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ini tentunya akan mengakibatkan kurangnya kesadaran akan lingkungan sekitar serta pengembangan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, karenanya bisa mempengaruhi berkembangnya objek

wisata pantai Bungin Nain dan pulau Nain

Ini disebabkan kurangnya perhatian yang diberikan pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dan kebudayaan terhadap kawasan objek wisata pantai Bungin dan pulau Nain. Dengan adanya campur tangan pemerintah daerah, pemerintah desa sangat mengharapkan bantuan khususnya dalam mengembangkan kawasan pantai Nain dan pulau Nain guna meningkatkan sector pariwisata yang di Kabupaten Minahasa Utara. Dalam mengembangkan Obyek Wisata Pantai Bungin Nain dan Pulau Nain memang belum sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Minahasa Utara. Ini disebabkan karena belum adanya perda yang mengatur khusus dengan jelas mengenai usaha kepariwisataan di Kab.Minahasa Utara serta pengelolaan (BUMDES) yang merata. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur masih terus berjalan dengan bantuan masyarakat sekitar dan pemerintah Desa yang ingin mengembangkan fasilitas dan sarana prasarana objek wisata Pantai dan Pulau Nain. Selain itu, pemerintah daerah yang dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Minahasa Utara harus lebih fokus dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada. Karena dilihat dari banyaknya kawasan yang berpotensi untuk dapat dijadikan objek pariwisata yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan baru dapat mengcover satu objek yaitu Pantai Pall Marinsow.

Melihat hal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Utara harus lebih berupaya untuk melaksanakan program-program kedepan seperti membuat peraturan daerah yang mengatur tentang kepariwisataan dan peraturan yang

mengatur tentang pengolahan objek dan daya tarik guna meningkatkan peranan dan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Utara dalam mengatur dan mengolah potensi objek-objek pariwisata yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam pencapaian kerja pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sampai dengan berakhirnya tahun 2016, peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan secara umum dikategorikan memuaskan meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Ini dapat dilihat dari hasil kinerja pemerintah daerah Minahasa Utara yang dapat dilihat dari hasil pencapaian kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pertama, output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik yang diharapkan oleh suatu organisasi atau instansi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari data yang ditemukan, pengembangan pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah barulah pada objek wisata Pantai Pasir Bungin yang lain. Selain masih asri ini tentunya sangat disayangkan, karena mengingat kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai objek wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Utara sangat banyak dan pemerintah daerah belum dapat mengcovernya, terutama objek wisata pantai Bungin Nain dan pulau Nain.

Kedua, hasil adalah mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian layanan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Maka segala sesuatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada jangka menengah oleh suatu organisasi atau instansi harus dapat memberikan efek

langsung dari kegiatan tersebut. Dari data yang ditemukan, pemerintah daerah melakukan konsultasi mengenai pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Minahasa Utara dan melakukan pendataan sarana dan prasarana penunjang sektor pariwisata yang nanti akan dikembangkan. Namun itu semua baru dalam tahap proses perencanaan yang masih belum pasti kapan pelaksanaannya.

Kesimpulan

1. Peranan pemerintah daerah yang dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Minahasa Utara dalam mengembangkan potensi objek wisata yaitu kawasan pantai Bungin Nain dan Pulau Nain belum berjalan dengan baik karena disebabkan antara lain :
 - a. Keterbatasan sumber dana
 - b. Masalah kepemilikan tanah
 - c. Kurangnya Investor
 - d. Kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat kawasan wisata
 - e. Terbatasnya SDM Dalam Bidang Pariwisata
 - f. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kepariwisataan dan peraturan yang mengatur tentang pengolahan objek dan daya tarik wisata.
2. Pembangunan fasilitas yang ada pada objek wisata kawasan pantai Bungin Nain dan pulau Nain adalah kios-kios makanan dan minuman dari para pemilik lahan dan pedagang musiman, beberapa kapal milik warga setempat untuk mengelilingi kawasan pantai dan menyebrang ke pulau Nain, beberapa dermaga penghubung sebanyak 3 buah serta satu bangunan Sumur air bersih dan MCK bantuan dari pemerintah daerah Kab. Minahasa Utara

3. Pengembangan potensi objek wisata pantai Bungin Nain dan pulau Nain akan berdampak pada :
 - a. Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), serta dapat mensejahterakan masyarakat lokal.
 - b. Terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal
 - c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat untuk mandiri
 - d. Perubahan pola pikir masyarakat pedesaan menjadi masyarakat modernMeningkatnya sektor pendidikan yang bermutu.

Saran

1. Dalam proses untuk mengembangkan objek wisata yang ada di Kab. Minahasa Utara hendaknya pemerintah daerah segera membuat peraturan daerah tentang kepariwisataan dan peraturan yang mengatur tentang pengolahan objek dan daya tarik wisata, agar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dengan maksimal menjalankan program-program yang telah dibuat.
2. Untuk masalah dana, pemerintah harus lebih memperhitungkannya dan mempehatikannya.
3. Dalam proses pengembangan objek wisata pemerintah daerah harus lebih memperhatikan kawasan wisata pantai Bungin Nain dan pulau Nain meskipun belum dapat sepenuhnya dicover oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, mengingat kawasan wisata pantai Bungin Nain dan pulau Nain merupakan tempat wisata yang baru dikenal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dougherty & Pritchard (2007) Bauer (2007: 55 - 56)
- Fandeli, Chafid. 2008. Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam. Yogyakarta: Liberty

- Kahn, et al., 2006; Oswald, Mossholder, & Harris, 2006 Bauer, 2006: 58)
- Pendit, S. Nyoman. 2003. Pengantar Ilmu Pariwisata. Jakarta :Pradya paraminta.
- Pitana, I Gede dan Diarta, I Ketut Surya. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta : ANDI
- Scott et al. (2007) Kanfer (2007: 197)
- Sunsun, Ernan. 2009 Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
- Rustiadi, Ernandkk. 2009. Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crestnt Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Soekadijo, R. G. 2006. Anatomi Pariwisata. Jakarta: Gramedia.
- Sumarmi. 2012. Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Malang: Aditya Media Publisng.
- Sunarno, Siswanto. 2005. Hukum Pemerintahan Daerah. Makassar: Sinar Grafika
- Suwantoro, Gamal. 2007, Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta : ANDI
- Yoeti, A. Oka. 2006. Pengantar IlmuPariwisata.Jakarta :Angkasa.
- Yoeti,A. Oka.2008. Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: PT Pradya Paraminta